

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman	21
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	21

2. Tujuan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman.....	28
3. Mahkamah Agung.....	32
4. Mahkamah Konstitusi	36
C. Tinjauan Umum tentang <i>Judicial Review</i>	40
1. Pengertian dan Istilah <i>Judicial Review</i>	40
2. Tujuan dan Fungsi <i>Judicial Review</i>	48
a) Hierarki Norma	49
b) Check and Balances	59
3. Sejarah Penerapan <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	64
a) Undang-Undang Dasar 1945.....	64
b) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949.....	66
c) Undang-Undang Dasar (Sementara) UUD(S) 1950.....	69
d) Undang-Undang Dasar 1945 (Dekrit 5 Juli 1959).....	71
e) UUD 1945 (Orde Baru).....	72
f) Pasca Perubahan UUD 1945.....	77
g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	78
4. Pembagian Kewenangan <i>Judicial Review</i> di Beberapa Negara.....	79
a) Korea Selatan	80
b) Austria.....	82

c) Jerman	85
d) Afrika Selatan	88
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Sifat Penelitian	93
B. Cara Penelitian	95
C. Jenis Data	96
D. Jalannya Penelitian	98
E. Analisis Data	99
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	100
A. Penerapan <i>Judicial Review</i> Dua Atap di Indonesia	100
1. Wewenang <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi	104
2. Wewenang <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung	107
3. Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam Pelaksanaan <i>Judicial Review</i> di Indonesia	112
B. Urgensi Penerapan <i>Judicial Review</i> Satu Atap Melalui Mahkamah Konstitusi di Indonesia	117
1. Menciptakan Sinkronisasi Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Kepastian Hukum di Indonesia	117
2. Upaya Penegakan Konstitusi Secara Integral Dalam Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Dapat Terwujud	135

3. Terakomodirnya Kewenangan <i>Judicial Review</i> Terhadap Seluruh Peraturan Perundang-Undangan.....	143
4. Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi Dalam Penyelesaian Perkara.....	152
C. Penerapan Judicial Review Satu Atap di Indonesia.....	158
BAB V PENUTUP	169
A. Kesimpulan	169
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA.....	175